

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Dalam Pendidikan Perempuan

1. Konteks Historis Pendidikan Islam di Indonesia

Proses masuknya agama Islam ke Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses islamisasi di wilayah lainnya. Berbeda dengan Mesir, Iran, atau Andalusia yang mengalami masuknya Islam melalui penaklukan militer, agama Islam masuk ke Indonesia melalui proses damai yang dibawa oleh para da'i sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dengan penuh toleransi dan diplomasi budaya.²⁹ Masuknya Islam ini memberikan pengaruh fundamental terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Sejak awal berkembangnya ajaran Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam sistem yang sederhana, di mana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat semacam masjid, mushalla, bahkan juga di rumah-rumah ulama.³⁰ Pada tahap awal, proses pendidikan berlangsung melalui kontak pribadi maupun kolektif antara para da'i dengan anggota masyarakat. Seiring dengan terbentuknya komunitas

²⁹ NASUTION, Fauziah. Kedatangan dan Perkembangan Islam ke Indonesia. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 2020, 11.1: 26-46.

³⁰ HAMBAL, Muhammad Hambal (2022). Sejarah Pendidikan Islam. Solo:Pustaka Arafah, hlm 21

muslim di suatu wilayah, dibangunlah masjid yang difungsikan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan Islam pertama. Masjid-masjid ini biasanya berlokasi di samping rumah kediaman para ulama atau da'i, menciptakan pusat pembelajaran yang terintegrasi dengan kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul institusi-institusi pendidikan Islam yang lebih formal seperti pesantren (populer di Jawa), dayah dan rangkang (Aceh), serta surau (Sumatera Barat). Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda-beda, ketiga institusi ini pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan agama.³¹ Variasi nama ini dipengaruhi oleh konteks geografis dan kultural lokal di mana institusi tersebut berkembang.³² Institusi pendidikan Islam tradisional pada masa awalnya memiliki karakteristik yang cukup spesifik:

- a. Kurikulum terbatas: Hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan klasik seperti tafsir al-Qur'an, hadis, akidah, dan fiqih
- b. Pengabaian ilmu umum: Ilmu-ilmu sekuler seperti berhitung, sains, dan teknologi tidak diajarkan
- c. Metode tradisional: Menggunakan metode sorogan, wetonan, dan hafalan
- d. Elitisme keilmuan: Penguasaan terhadap khazanah kitab klasik menjadi ukuran tunggal tinggi rendahnya ilmu seseorang

³¹ PANE, Ismail. Peradaban Islam di Indonesia. *Journal of Education and Culture*, 2023, 3.1: 15-20.

³² Permana, Rahayu: Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, Jurnal Dinus 2015, 1.1:1-27

Sistem pendidikan Islam yang demikian kontras dengan sistem pendidikan kolonial Belanda yang mulai dikembangkan pada abad ke-17. Pendidikan kolonial bersifat sekuler dengan sama sekali tidak mengajarkan ilmu agama, sementara pendidikan Islam tradisional mengabaikan ilmu-ilmu umum dengan anggapan bahwa mempelajari ilmu sekuler setara dengan kekafiran. Dualisme sistem pendidikan ini menciptakan jurang pemisah yang dalam antara "pendidikan pribumi" (diwakili pesantren) dan "pendidikan modern" (dimiliki pemerintah kolonial).

Abuddin Nata mengidentifikasi bahwa keptahanan sistem pendidikan Islam yang konservatif menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran bangsa Indonesia. Masyarakat terjebak dalam kebodohan, keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta pemahaman agama yang sempit yang hanya memperhatikan aspek ritualitas tanpa konteks yang selaras dengan al-Qur'an dan Hadis. Padahal, firman Allah SWT dalam Surat al-'Alaq ayat 1 menegaskan perintah membaca dan menelaah sebagai fondasi peradaban Islam: "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan...*" Al-Qur'an sesungguhnya telah mengindikasikan urgensi untuk mempelajari, menganalisis, membaca, menelaah, mengobservasi, dan mengidentifikasi ayat-ayat Allah—baik yang tertulis (al-Qur'an) maupun yang tidak tertulis (alam semesta beserta hukum kausalitasnya)—untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.³³

³³ Nata, Abuddin. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 76-78.

2. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam Pembaharuan Pendidikan

Kondisi umat Islam di masa penjajahan mengalami krisis pendidikan, ekonomi dan semua sector. Dalam situasi kritis tersebut, muncul KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) sebagai pemikir dan perintis pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau merupakan tokoh sentral dan pahlawan nasional yang memberikan kontribusi monumental terhadap perkembangan pendidikan Islam modern di tanah air. Dikenal sebagai pendakwah ulung dan pendiri organisasi Muhammadiyah (1912), KH. Ahmad Dahlan mencerminkan sosok yang cerdas, visioner, dan memiliki prinsip hidup "*sepi ing pamrih tapi rame ing gawe*" (sedikit berbicara tetapi banyak bekerja)³⁴. Latar belakang munculnya ide pembaruan pemikiran KH. Ahmad Dahlan tidak terlepas dari keprihatinan dan kegelisahannya terhadap kondisi umat Islam global yang tenggelam dalam kejumudan berpikir, kebodohan, dan keterbelakangan. Situasi ini diperparah oleh kondisi bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda dengan segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Benih pemikiran pembaruan ini mulai tumbuh sejak kunjungannya pertama ke Mekkah, dan semakin mantap setelah kunjungan kedua ke Tanah Suci.

Bagi KH. Ahmad Dahlan, pendidikan merupakan instrumen strategis utama untuk menyelamatkan umat Islam dari keterbelakangan dan mengubah pola berpikir yang statis menjadi dinamis, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu,

³⁴ Nashir, Haidar. (2015). *Muhammadiyah: Gerakan Pembaharuan untuk Kemaslahatan Umat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

pendidikan harus ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Umat Islam hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam berbagai bidang kehidupan. Sistem pendidikan Islam tradisional yang konservatif ini menggunakan metode *sorogan*, *wetonan*, dan hafalan, dengan penguasaan khazanah kitab klasik sebagai ukuran tunggal keilmuan. Di sisi lain, pendidikan kolonial Belanda menawarkan ilmu pengetahuan modern namun dengan muatan sekuler yang sama sekali mengabaikan dimensi spiritual.³⁵ Jamil (2005: 45) menegaskan bahwa dualisme ini menciptakan jurang pemisah antara "orang terpelajar" dan "orang beragama. Kunci kemajuan umat Islam menurut KH. Ahmad Dahlan terletak pada tiga pilar utama:

- a. Kembali kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang autentik
 - b. Pemahaman komprehensif terhadap ajaran Islam yang tidak reduksionis
 - c. Penguasaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan modern dan keislaman
- Upaya strategis ini dapat direalisasikan secara sistematis melalui institusi pendidikan yang terstruktur dan modern.

³⁵ Ahmad Isa Mubaroq, Aslich Maulana, Hasan Basri, Jurnal TAMADDUN ± FAI UMG. Vol. XX. No.2 / Juli 2019

3. Karakteristik Pemikiran Pendidikan KH. Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan merupakan tipe "man of action" atau praktisi yang lebih menonjolkan karya nyata dibandingkan produksi tulisan teoritis. Meskipun tidak meninggalkan banyak karya tulisan, gagasan-gagasannya terefleksikan dengan jelas dalam amal usaha Muhammadiyah yang menjadi manifestasi konkret pemikirannya di bidang keagamaan dan pendidikan.

Dalam teori Pendidikan kontemporer pemikiran KH. Ahmad Dahlan dapat dikategorikan dalam paradigma Pendidikan kritis-rekonstruktif. Secara dimensi ekologis karakteristik interkasi wahyu, akal, dan pengalaman dari teori Roy Bhaskar "*Critical Realism*"³⁶. Sebagai suatu istilah, "realisme kritis" muncul secara independen di Inggris pada 1980an ketika muncul satu kebutuhan untuk mengacu kepada (1) realisme transendental (transcendental realism), dan (2) naturalisme kritis (critical naturalism) sebagai sebuah unit. Keduanya dijelaskan sebagai berikut: (1) "Realisme transendental" adalah metode kunci dalam A Realist Theory of Science (1975) yang berperan untuk membersihkan kekeliruan-kekeliruan pemahaman mengenai ilmu. Metode ini bertolak dari pertanyaan transendental ala Immanuel Kant: Apakah hal-hal yang mesti ada yang membuat ilmu atau sains itu mungkin? Tapi, Bhaskar secara cerdas membalik transendentalisme Kantian yang bersifat idealis menjadi transendentalisme yang bersifat realis. Itulah mengapa gagasan Bhaskar

³⁶ Nurul Huda, Muhammad, "Filsafat Kritis Roy Bhaskar: 'Pelayan' Filosofis untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris", Muqoddima Jurnal Pemikiran Riset dan Teknologi Vol. 1 No. 1 Juni 2020 : 43 - 76

disebut sebagai suatu "revolusi Kopernikan" atas pemikiran Kant secara Kantian. (2) "Naturalisme kritis" adalah aplikasi realisme transendental dalam ilmu-ilmu sosial yang teruang dalam buku *The Possibility of Naturalism* (1979)³⁷. Di sini, Bhaskar menyatakan suatu posisi yang (a) kontra naturalisme reduktif yang berakar pada realisme empiris dan (b) kontra antinaturalisme yang berakar pada idealism. Ia menegaskan bahwa ilmu sosial dapat menjadi ilmiah sejauh para ilmuwan mengacu pada mekanisme-mekanisme generatif pada level sosial untuk menjelas fenomena sosial dalam kaitannya dengan penyebab-penyebab kausal.

Dimensi Ontology dengan karakteristik manusia sebagai khalifah yang potensial teori dari Seyyed Hossein Nasr³⁸ adalah salah satu filsuf yang mendalami manusia dalam filsafat abadinya. Dalam filosofinya yang bertahan lama, Nasr berupaya secara radikal mengungkapkan berbagai subjek penelitian melalui apa yang disebutnya perspektif tradisional. Tradisi di sini berarti Nasr mencoba menjelaskan pandangannya dengan menggunakan teks yang disebut Tradisi dalam Bahasa Inggris. Sejalan dengan para pendukung pandangan tradisional, Nasr percaya bahwa pada dasarnya semua deskripsi tentang sifat manusia ditemukan dalam teks-teks agama. Namun, masyarakat biasanya mengabaikan teks-teks tersebut, membuatnya tampak tersembunyi. Apalagi di tengah modernitas yang biasanya meninggalkan spiritualitas Nasr, mencoba dalam pendekatan

³⁷ *Ibid hal. 13*

³⁸ Sayyid Musthofa Ahmad, Munir and Maman Lukmanul Hakim (2023) "*Konsep Manusia Dalam Pandangan Sayyed Hossein Nasr*", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), pp. 348–362. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.471.

tradisional untuk menjelaskan sifat manusia dengan mengkritik ideologi dunia modern, yang saat ini menerima kehidupan manusia. Menurutnya, ideologi dunia modern menjauhkan manusia dari pusat eksistensi, menurut Nasr, spiritualitas. “Dua puluh tahun yang lalu semua orang berbicara tentang kemungkinan tak terbatas dari perkembangan manusia, baik secara eksternal maupun material, tetapi hari ini semua orang berbicara tentang batas pertumbuhan frase yang sedang populer di Barat atau bahkan tentang bencana yang akan datang dari umat manusia. Namun, konsep dan faktor yang digunakan untuk menganalisis krisis yang dihadapi umat manusia modern, solusi yang dicari, dan bahkan umat manusia Bahkan warna yang mewakili bencana yang menimpa biasanya berdasarkan faktor penyebab terjadinya krisis. Kehidupan di dunia ini sepertinya masih belum memiliki cakrawala spiritual. Ini bukan karena tidak ada cakrawala spiritual, tetapi karena saksi panorama kehidupan modern ini sering kali adalah orang-orang yang hidup di pinggiran lingkaran keberadaan, mereka melihat sesuatu hanyamdari sudut pandang mereka sendiri, jari-jari lingkaran keberadaan, sama sekali melupakan sumbu dan pusat lingkaran keberadaan yang dapat dijangkau oleh jari-jari tersebut.” Nasr didasarkan pada konsepsi Al-Qur'an tentang penciptaan manusia, yang menjelaskan bahwa manusia pada mulanya diciptakan dari tanah liat dan Tuhan memberinya Ruh, seperti yang ditemukan dalam Surah al-Hijr, ayat 28-29 : “Dan (ingatlah) ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya, Aku

menciptakan manusia dari tanah liat kering (dari lumpur hitam yang membentuknya); bersujud.”

Dimensi aksiologi dengan karakteristik kemaslahatan individual kolektif teori “*Social Recontructionism*” yang digerakkan oleh Goerge Counts³⁹ bahwa aliran rekonstruksionisme berkeyakinan tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua manusia. Oleh karena itu, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Di samping itu, aliran ini juga mempunyai persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Cita-cita demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya teori, harus diwujudkan menjadi kenyataan, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama (kepercayaan) dan masyarakat yang bersangkutan. Pada perkembangannya rekonstruksionisme mengalami pengembangan-pengembangan berkaitan dengan kepentingan persiapan menghadapi tantangan masa depan yang dalam hal ini berhubungan dengan futurisme.

Dimensi metodologi karakteristik organisasi rasional nilai keislaman dari Max Weber tentang teori Institutional Rationalism memandang tindakan

³⁹ PURNAMASARI, Iin. “Rekonstruksionisme-futuristik dalam pendidikan di Indonesia”. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2015, 5.2.

sosial sebagai perilaku individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional berorientasi nilai. Tipologi ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami motif, orientasi, dan makna di balik Tindakan individu dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks hubungan antarumat beragama.⁴⁰ Weber menegaskan bahwa tujuan utama dari teori tindakan sosial adalah memahami motif dan orientasi tindakan aktor. Melalui pemahaman terhadap motif tersebut, dapat mengidentifikasi pola dan corak perilaku individu maupun kelompok dalam konteks sosial tertentu. Weber menyatakan bahwa cara terbaik untuk memahami tindakan manusia dengan menafsirkan bentuk-bentuk tipikal tindakan sebagai karakteristik khas yang merepresentasikan alasan mengapa seseorang bertindak. Pendekatan ini menempatkan tindakan sosial sebagai pusat analisis dalam memahami dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam praktik toleransi beragama. Dalam kerangka analitisnya, Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat tipe ideal. Pertama, tindakan tradisional, yaitu Tindakan yang didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dilakukan secara berulang tanpa refleksi rasional yang mendalam. Kedua, tindakan afektif, yakni Tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi emosional pelaku. Ketiga, tindakan rasional

⁴⁰ Agustina, Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 6 No 2 Tahun 2023. Hal. 189-196

instrumental (zweckrational), yaitu tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara rasional melalui perhitungan sarana dan hasil. Keempat, tindakan rasional berorientasi nilai (wertrational), yaitu tindakan yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu tanpa mempertimbangkan keberhasilan atau kegagalan praktisnya. Keempat tipe tindakan ini bersifat ideal-tipikal dan dapat saling beririsan dalam praktik sosial.⁴¹

4. Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah

Muhammadiyah telah berkiprah khususnya dibidang pendidikan sejak lahirnya tahun 1912 untuk kemajuan bangsa indonesia antara lain: membangun sistem pendidikan islam modern, melakukan tajdid pemahaman Islam, memperbarui alam pikiran ke arah kemajuan atau kemoderenan, gerakan al-maa'un (penyantunan) dan penolong kesengsaraan umum, membentengi umat islam dalam berbagai ancaman luar, memodernisasi kehidupan masyarakat dan memelopori kemajuan perempuan islam ke ruang publik. Pendidikan perempuan di Muhammadiyah berlandaskan Al Quran dan As Sunnah yang tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan.⁴² Berdasarkan beberapa literatur yang dibaca peneliti terdapat lima pilar Pendidikan perempuan KH. Ahmad Dahlan:

a. Kesetaraan dalam menuntut ilmu menurut KH. Ahmad Dahlan.

⁴¹ THAROM, Muhammad. Ritualitas Keagamaan dan Toleransi Beragama Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber. *Journal Khafi: Journal Of Islamic Studies*, 2025, 3.3: 93-103.

⁴² Mawardi, Amirah, studi pemikiran pendidikan kh. ahmad dahlan, Jurnal Tarbawi, Volume 1, No 2, hal. 94-102

KH. Ahmad Dahlan memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dalam konteks masyarakat kolonial yang masih menganut pandangan "*swargo nunut neraka katut*" (kebahagiaan/pergumulan perempuan tergantung pada suami), KH. Ahmad Dahlan mengetengahkan konsep kesetaraan gender berdasarkan tafsir Al-Qur'an. KH. Ahmad Dahlan mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal (Madrasah Ibtidaiyah Diniyyah Islamiyah, Sekolah Pawiyatan Muhammadiyah, Al-Qismu Arqa) dan nonformal (Sopo Tresno, Wal 'Asri, 'Aisyiyah) khusus untuk perempuan⁴³.

Selain itu, KH. Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai pelopor pendidikan inklusif di Indonesia. Ia menolak sistem pendidikan tradisional yang cenderung eksklusif dan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Sebaliknya, ia mengusulkan sistem pendidikan yang terbuka dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Didirikannya 'Aisyiyah⁴⁴ membuka kesempatan bagi Nyai Siti Walidah untuk memberikan pemikirannya bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Selain itu Nyai Siti Walidah

⁴³ Mulya, gani dkk, Praksis Feminisme Menurut Pandangan K.H. Ahmad Dahlan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Vol. 15, No. 1, Januari 2025 e-ISSN 2549-2594

⁴⁴ Aisyiah berasal dari kata Aisyah, yaitu nama salah satu istri nabi Muhammad yang kemudian ditambah ya' nisbiyah yang berarti pengikut atau pengiring. Muhammadiyah menamakan gerakan wanitanya dengan Aisyiyah bermaksud agar kaum ibu dalam Muhammadiyah ikut berjuang beresama-sama dalam menyampaikan ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat serta dapat meneladani peri kehidupan dan perjuangan ibu kaum muslimin, yaitu Aisyiyah <https://aisyiyah.or.id/profil/>

menentang praktik kawin paksa. Tekanan terhadap kaum perempuan pada saat itu telah membuka wacana Nyai Siti Waidah dalam memperjuangkan kaum perempuan. Dari tekad yang kuat dan dorongan suami, pada tahun 1914 Nyai Siti Walidah diberi kesempatan membina kelompok pengajian yang anggotanya adalah ibu-ibu dan perempuan muda. Di antara pengajian tersebut adalah Sopo Tresno cikal bakal 'Aisyiyah, Wal 'Asri, dan Magribi School. Materi pengajian antara lain adalah masalah agama, membaca dan menulis agar bisa bersikap jujur dan tidak merasa kecil hati karena menganggap dirinya bodoh. Yang menarik adalah ketika Nyai Siti Walidah mampu menyesuaikan dengan pemikiran suami dalam pendidikan Islam modern meski Nyai Siti Walidah tidak pernah menempuh Pendidikan formal. Nyai Siti Walidah menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban yang sangat besar dalam pendidikan untuk mengentaskan kaumnya dari belenggu kebodohan⁴⁵.

b. Ajaran Islam sebagai Landasan Pendidikan KH. Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan menegaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Pendidikan perempuan tidak hanya bertujuan untuk keterampilan domestik, tetapi untuk membentuk Muslimah yang mampu berdakwah dan berkontribusi dalam kemajuan umat. Pendidikan perempuan dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem keilmuan yang menekankan kesetaraan,

⁴⁵ ARDIYANI, Dian. Konsep Pendidikan Perempuan Siti Walidah. *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, 2017, 15.1: 12-20.

akhlak, dan tanggung jawab sosial. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits telah menegaskan pentingnya ilmu bagi perempuan, praktik sosial masih menunjukkan ketimpangan akibat budaya patriarki dan salah tafsir ajaran agama. Islam menempatkan perempuan sebagai subjek aktif pendidikan, yang bertugas membangun generasi beriman, berilmu, dan berakhlak. Pendidikan perempuan tidak sekadar hak, melainkan strategi peradaban untuk membentuk masyarakat Muslim yang adil dan berkemajuan.⁴⁶

c. Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum Mengikuti tradisi reformis Islam.

KH. Ahmad Dahlan menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan modern (matematika, fisika, biologi, bahasa Belanda). Pendekatan ini dianggap revolusioner karena melawan sistem pendidikan tradisional yang hanya menekankan hafalan kitab kuning tanpa pemahaman kontekstual.⁴⁷ Dalam konteks pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh yang mempengaruhi Dahlan, teori ini menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Pemikiran Muhammad Abduh muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pembaruan di tengah arus perubahan sosial dan politik yang melanda dunia Islam pada masa itu. Abduh menyadari bahwa pendidikan Islam tradisional yang memisahkan ilmu agama dan

⁴⁶ MULTAZAMI, M.; RAMADHANI, Khorilia; THOBRONI, Ahmad Yusam. Konsep Pendidikan Perempuan Perspektif Al-Qur'an-Hadits dan Kaitannya dengan Pandangan para Tokoh Islam dalam Mendidik Anak Perempuan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2025, 3.3: 703-715.

⁴⁷ BAGIR, Zainal Abidin. *Integrasi ilmu dan agama: interpretasi dan aksi*. Mizan Pustaka, 2005. Hal. 20-27

ilmu umum menyebabkan ketidakberimbangan yang menghambat kemajuan umat Islam.

Dualisme ini, menurutnya, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang. Oleh karena itu, ia berupaya untuk menghapuskan pemisahan tersebut dengan menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan ajaran Islam. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan individu yang mampu berperan aktif dalam masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya⁴⁸. Pemikiran Abduh ini mencerminkan upaya untuk merumuskan kembali tujuan pendidikan yang lebih holistik, yang menggabungkan aspek intelektual dan moral. Dalam upayanya, Abduh menekankan pentingnya perubahan dalam empat aspek utama pendidikan formal: tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, dan pendidikan perempuan. Menurutnya, tujuan pendidikan harus tidak hanya fokus pada pembentukan kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak yang mulia⁴⁹.

Dalam hal kurikulum, ia mengusulkan agar pendidikan mencakup ilmu pengetahuan modern, seperti sains dan filsafat, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Selain itu, Muhammad Abduh juga menyarankan perubahan dalam metode pengajaran, dengan pendekatan

⁴⁸ Sugiati, K.H Ahmad Dahlan Tinjauan Terhadap Konsep Pendidikannya, *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* Vol 2. No. 3, Juli 2022. Hal. 169-177

⁴⁹ FAIZI, Nur. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan Kontemporer. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2022, 16.1: 1-12.

yang lebih terbuka dan dialogis, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Abduh juga memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, yang menurutnya sangat penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan seimbang, di mana perempuan memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam bidang intelektual maupun spiritual⁵⁰

Pendidikan Islam harus mengintegrasikan Ilmu naqli (agama) dan ilmu aqli (sains/modern), pendidikan kejuruan dan keterampilan praktis, Pemikiran rasional dan metode ilmiah. KH. Ahmad Dahlan membuktikan teori ini melalui pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mengajarkan matematika, sains, dan bahasa asing bersandingan dengan pendidikan agama konsep yang revolusioner pada zamannya. Pendidikan menurut KH. Ahmad Dahlan adalah instrument untuk perubahan dan pembaharuan masyarakat. Teori ini berpijak pada: Tawhid sosial: Kesetaraan manusia di hadapan Allah melawan hierarki feodal colonial

B. Perilaku dan Peran Siswa Perempuan di Sekolah Muhammadiyah

Sekolah Muhammadiyah merupakan institusi pendidikan Islam modern yang sejak awal berdirinya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kemajuan dan pembaruan sosial. Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial peserta didik. Dalam konteks ini,

⁵⁰ ASIFA, Falasipatul. Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2018, 15.1: 88-98.

perilaku dan peran siswa perempuan tidak dipahami secara sempit sebagai peserta didik pasif, melainkan sebagai subjek pendidikan yang memiliki potensi intelektual, spiritual, dan sosial yang setara dengan siswa laki-laki.⁵¹ Prinsip ini sejalan dengan pemikiran KH. Ahmad Dahlan yang menempatkan perempuan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁵²

1. Konsep Perilaku Siswa dalam Perspektif Pendidikan Islam

Perilaku siswa dalam pendidikan Islam tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi juga dari dimensi afektif dan psikomotorik yang tercermin dalam sikap, akhlak, dan tindakan sehari-hari. Abuddin Nata menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian muslim yang utuh (*insan kamil*), yaitu individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.⁵³ Oleh karena itu, perilaku siswa perempuan di sekolah Muhammadiyah diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kesantunan, dan kepedulian sosial.

Dalam perspektif Muhammadiyah, perilaku religius tidak berhenti pada praktik ritual ibadah, tetapi diwujudkan dalam etos belajar, etos kerja, dan etos sosial.⁵⁴ Siswa perempuan didorong untuk memiliki kesadaran diri (*self-awareness*) sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, sehingga

⁵¹ Haedar Nashir, *Pendidikan Islam Berkemajuan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 98.

⁵² Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis Muhammadiyah* (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 121.

⁵³ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45–47

⁵⁴ Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 67

perilaku yang ditampilkan mencerminkan keseimbangan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial.⁵⁵

2. Peran Siswa Perempuan dalam Lingkungan Sekolah Muhammadiyah

Peran siswa perempuan di sekolah Muhammadiyah mencakup berbagai dimensi, antara lain peran akademik, sosial, keorganisasian, dan kepemimpinan. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa perempuan diberi kesempatan yang sama untuk berprestasi secara akademik, mengemukakan pendapat, berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan pendidikan yang diperjuangkan oleh KH. Ahmad Dahlan dan dilanjutkan oleh Muhammadiyah melalui sistem pendidikan modern.⁵⁶

Selain dalam ranah akademik, siswa perempuan juga berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, serta aktivitas keagamaan dan sosial. Keterlibatan dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), kegiatan keputrian, bakti sosial, dan pengembangan keterampilan kepemimpinan menjadi wahana pembentukan karakter dan kepercayaan diri. Tilaar menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang memberi ruang partisipasi aktif kepada peserta didik agar mereka mampu mengembangkan potensi kepemimpinan dan tanggung jawab sosial sejak dini.⁵⁷

3. Pembinaan Perilaku dan Karakter Siswa Perempuan

⁵⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.

⁵⁶ Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Persada, 2010), hlm. 156.

⁵⁷ H.A.R. Tilaar, *Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 163.

Pembinaan perilaku siswa perempuan di sekolah Muhammadiyah dilakukan melalui pendekatan keteladanan (*uswah hasanah*), pembiasaan (*habituation*), dan penguatan nilai (*value reinforcement*). Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan moral. Lingkungan sekolah dibangun sebagai kultur edukatif-religius yang mendukung tumbuhnya karakter islami dan berkemajuan.⁵⁸

Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada pengenalan benar dan salah, tetapi pada proses internalisasi nilai moral agar tertanam dalam kepribadian dan perilaku peserta didik.⁵⁹

Hasil penelitian Nurhayati menunjukkan bahwa sekolah Muhammadiyah memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter perempuan muslim yang mandiri, religius, dan memiliki kesadaran sosial yang kuat.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dan peran siswa perempuan di sekolah Muhammadiyah merupakan refleksi konkret dari nilai-nilai pendidikan perempuan yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah.

C. Pendidikan Perempuan di Indonesia

Pendidikan perempuan di Indonesia merupakan bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan peradaban. Perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial,

⁵⁸ Zamroni, Pendidikan Demokrasi (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), hlm. 72.

⁵⁹ Muhammad Arfan Mu'ammam, Sujinah, and Ali Nuke Affandy, "Children's Good Character Development with Traditional Literature for Conveying Moral Values," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11, no. 5 (2020): 234–46.

⁶⁰ Siti Nurhayati, "Pendidikan Karakter Perempuan di Sekolah Muhammadiyah," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, No. 2 (2019): 145–160

budaya, agama, dan politik yang membentuk struktur masyarakat Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era kontemporer.⁶¹

1. Pendidikan Perempuan pada Masa Pra-Kemerdekaan

Pada masa pra-kemerdekaan, akses perempuan terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Budaya patriarki yang kuat menempatkan perempuan pada ranah domestik, sementara pendidikan formal lebih diprioritaskan bagi laki-laki.⁶² Dalam masyarakat Jawa berkembang pandangan bahwa perempuan cukup menguasai keterampilan rumah tangga dan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif dan elitis.⁶³

Namun demikian, muncul tokoh-tokoh pembaharu yang memperjuangkan pendidikan perempuan, baik dari kalangan nasionalis maupun Islam. Selain R.A. Kartini, KH. Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah menjadi pelopor pendidikan perempuan berbasis Islam yang progresif. Melalui Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, pendidikan perempuan tidak hanya diarahkan pada kecakapan domestik, tetapi juga pada penguatan intelektual, spiritual, dan sosial.⁶⁴

2. Pendidikan Perempuan Pasca-Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan perempuan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang

⁶¹ Arif Suryadi & Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan* (Bandung: Genesindo, 2009), hlm. 1–3.

⁶² Lies Marcoes, *Muslimah Reformis* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015), hlm. 40.

⁶³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 178

⁶⁴ Arif Suryadi & Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*, hlm. 56–60

menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi gender. Pemerintah mulai memperluas akses pendidikan bagi perempuan melalui pembangunan sekolah, kebijakan wajib belajar, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah.⁶⁵

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan tidak sepenuhnya hilang, terutama dalam aspek kualitas pendidikan, partisipasi pendidikan tinggi, dan pilihan bidang studi. Laporan UNESCO menyebutkan bahwa perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi hambatan struktural berupa kemiskinan, norma budaya, dan beban domestik yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka.⁶⁶

3. Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam dan Tantangan Kontemporer

Dalam perspektif Islam, pendidikan perempuan merupakan kewajiban religius dan strategi peradaban. Islam tidak membedakan kewajiban menuntut ilmu antara laki-laki dan perempuan.⁶⁷ Namun dalam praktik sosial, ajaran ini sering mengalami distorsi akibat budaya patriarki dan penafsiran agama yang sempit. Oleh karena itu, pendidikan perempuan di Indonesia menghadapi tantangan ganda, yaitu tantangan struktural dan kultural-religius.⁶⁸

⁶⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Peta Jalan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kemendikbud, 2017), hlm. 21

⁶⁶ UNESCO, *Global Education Monitoring Report* (Paris: UNESCO, 2018), hlm. 14–18

⁶⁷ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 201.

⁶⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar, 2007), hlm. 25.

Muhammadiyah memandang pendidikan perempuan sebagai kunci kemajuan bangsa dan umat. Pendidikan perempuan diarahkan pada pembentukan perempuan muslim yang beriman, berilmu, mandiri, dan berdaya saing global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dalam konteks ini, pendidikan perempuan tidak hanya berorientasi pada kesetaraan, tetapi juga pada kemaslahatan individu dan masyarakat⁶⁹.



⁶⁹ Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan* (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 201–205